

PEMBIAYAAN QARDUL HASAN DI BANK SYARIAH MANDIRI KOTA MATARAM

Dedi Riswandi

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri IAIN Mataram
Email: rizwanedhy@yahoo.co.id

Abstract: The long range economy crises has caused the increase of poverty and unemployment. Poverty is social problem which should be solved. One of solutions that can be applied to improve poor people's welfare is the distribution of alms taken through several sources, such zakat, infak, and shodakoh. At present, there are many institutions accepting alms and distributing it. These also use alms for productive exertion, such as Islamic Bank. The distribution mechanism of alms in Islamic Banking is released in *qard al-hasan* financing, that ignoring the share of profit and interest. The purpose of the research is to describe the implementation of financing of *qard al-hasan* in Bank Syariah Mandiri Mataram and also to analyze the contribution of *qard al-hasan* alms in level of exertion development of bank customer after getting cost from *qard al-hasan*. The characteristic of the research is description, its mean the description of condition. The research using descriptive design, use some methods one of them is case study, the research uses detail study, dept, all on object that relatively small one time with in environment. The data collecting process in this research are sampling, interview and documentation. To analyze qualitative data, using inductive method, inductive tough design is to analyze the specific data to general data. The conclusion of this research is that in financing process, bank give easies to bank customer, but in networking process bank try to find out the bank customer that has good will and ability. This networking process did by investigating. The contribution *qard al-hasan* alms for the bank customer is there any improving of average value Rp 505.000,- to average Rp. 775.000,- per months or there is Rp. 400.000,- any increasing of income average value 66%. Beside there is improving of income, this Qardhul hasan loan caused the improvement of operation capital from average value Rp. 2.040.000,- to average Rp. 3.340.000,-.

Keywords: *financing, qard al-hasan, and exertion Revenue*

Abstrak: Krisis ekonomi jarak jauh telah menyebabkan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan adalah masalah sosial yang harus diselesaikan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin adalah distribusi zakat yang diambil melalui beberapa sumber, zakat seperti, infak, dan shadaqah. Saat ini, ada banyak lembaga menerima sedekah dan mendistribusikannya. Ini juga menggunakan sedekah untuk tenaga produktif, seperti Bank Islam. Mekanisme distribusi zakat di Bank Syariah dilepaskan dalam pembiayaan *qard al-hasan*, yang mengabaikan bagian laba dan bunga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan pembiayaan *qard al-hasan* di Bank Syariah Mandiri Mataram dan juga untuk menganalisis kontribusi *qard al-hasan* di tingkat nasabah bank setelah mendapatkan biaya dari *qard al-hasan*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sampling, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data-data kualitatif digunakan metode induktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam proses pembiayaan, perbankan memberikan kemudahan untuk nasabah bank, dengan melakukan studi kelayakan untuk mencari tahu nasabah bank yang memiliki niat baik dan kemampuan. Kontribusi *qard al-hasan* terhadap nasabah bank apakah rata-rata Rp 505,000, - dengan rata-rata Rp. 775,000, - per bulan atau Rp. 400.000, - setiap peningkatan rata pendapatan nilai 66%. Selain ada peningkatan pendapatan, pinjaman *qard al-hasan* ini disebabkan peningkatan modal operasi dari nilai rata-rata Rp. 2.040.000, - dengan rata-rata Rp. 3.340.000, -.

Kata kunci: *pembiayaan, qard al-hasan, bank shari'ah*

A. Pendahuluan

Perbankan Syariah telah memberi pengaruh yang luas terhadap perbaikan ekonomi umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam. Pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR RI, telah mengganti UU Perbankan No. 10 tahun 1998 dengan UU Perbankan No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semakin memperkuat eksistensinya dalam lalu lintas perekonomian umat yaitu menghimpun dana

dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan syariat Islam.¹

Perkembangan perbankan syariah diikuti dengan pertumbuhan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sejauh ini telah menunjukkan geliat yang sangat baik. Wajar bila sektor ini menjadi fokus pembiayaan perbankan syariah. Sektor UKM bahkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini juga yang menjadi pendorong perekonomian saat krisis melanda. Sama seperti UKM, perbankan syariah yang selama ini ditepikan justru menunjukkan eksistensinya saat krisis terjadi. Potensi besar dari UKM tersebut menjadi salah satu poin penting bagi bank-bank syariah untuk penyaluran pembiayaannya.

Bukan hanya Bank Muamalat yang peduli terhadap perkembangan UKM, Bank Syariah Mandiri (BSM) termasuk yang getol untuk meraih pangsa pasar UKM. Awal tahun 2009, BSM akan tetap mempertahankan porsi dana penyaluran untuk UKM sebesar 57%. Kendati demikian, BSM berharap bisa meningkatkan pertumbuhan hingga 80%. Pada tahun 2005, posisi pembiayaan UKM oleh BSM mencapai Rp.3,26 triliun. Pada 2006 mengalami kenaikan Rp.4,83 triliun. Pada periode 2007-2008 telah mencapai Rp.7,72 triliun sehingga total pembiayaan mencapai Rp.13 triliun.²

Lembaga perbankan syariah kemudian menjadi satu kebutuhan vital dalam pergerakan ekonomi. Ketergantungan terhadap perbankan syariah merupakan suatu keharusan bagi para pelaku ekonomi baik yang berskala kecil maupun besar. Hal itu dikarenakan usaha yang dijalannya selalu bersinggungan dengan ketersediaan modal yang notabene berada dalam kekuasaan lembaga perbankan.³ Modal tenaga dan keahlian tidak bisa dijadikan jaminan keberhasilan dalam suatu usaha. Kegiatan usaha produktif yang dilakukan oleh golongan ekonomi lemah seperti UKM sebenarnya mempunyai prospek yang cukup cerah, namun pada kenyataannya banyak yang kemudian terbentur oleh faktor modal.

Upaya Bank syaria'ah dalam mengoptimalkan UKM terdapat dalam model akad (transaksi) *tabarru'*, dan produk pembiayaan *qard' al-hasan* termasuk dalam akad *tabarru'* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *not-profit*

¹Akhmad Mujahidin, *Penguatan Usaha Ekonomi Umat Melalui Perbankan Syariah*, Annual Conference On Islamic Studies (ACIS) ke-10, Banjarmasin 1-4 November 2010. h. 732.

²www.Seputar-indonesia.com : *Raih Dukungan Bank Syariah*, akses tanggal 7 Januari 2011

³Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Cet. I (Yogyakarta: LPPI, 2001) h. 117-118.

transaction (transaksi nir-laba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *Tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.⁴ Jelasnya Akad *Tabarru'* adalah semata-mata untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dana tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun, apalagi dalam bentuk persenan (bunga).

Hal ini sesuai dengan tujuan sistem perbankan Islam yang ingin membawa masyarakat paling tidak pada pelaksanaan dua ajaran al-Qur'an yaitu prinsip menghindari *al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Prinsip *al-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat.⁵

Keberadaan produk *Qardhul hasan* adalah salah satu solusi untuk mengoptimalkan dana zakat (infaq dan Shadaqah). Ulama sangat menyadari bahwa pensyari'atan ZIS adalah salah satu terobosan besar yang ditawarkan Islam dalam sistem interaksi sosial-ekonomi sepanjang sejarah umat manusia sebagai solusi untuk usaha mengentaskan kemiskinan, menumbuhkan solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, mengurangi kesenjangan dan yang terpenting adalah sebagai investasi modal bagi para mustahik dalam mengatasi berbagai kesulitan hidup.

Pembiayaan *Qardhul hasan*, meski bukan sebuah produk komersial namun sangat penting untuk diterapkan dalam jumlah yang proporsional karena *Qardhul hasan* adalah salah satu ciri perbankan syariah. Dalam konteks korporasi, *Qardhul Hasan* dapat berperan sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Penerapan *Qardhul hasan* dalam perbankan syariah lebih strategis karena sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam membangun perekonomian umat, tentu bukan hanya dari praktek pembiayaan namun juga dari segi pengembangan usaha.

Kota Mataram merupakan kota yang berada di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Mataram merupakan daerah yang dinilai sangat cocok untuk pengembangan UKM. Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan di antaranya adalah kondisi perekonomian masyarakat yang sangat lemah dan pertumbuhan

⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Cetakan 1, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h. 68.

⁵Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Cetakan 3, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), h. 11

penduduk yang sangat padat menuntut masyarakat untuk mencari usaha sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan situasi ini, usaha yang berbasis UKM lebih berpotensi dibandingkan dengan kegiatan usaha ekonomi berbasis industri. Selain itu faktor sosial keagamaan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dengan prosentase 90% serta banyaknya lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan madrasah yang memunculkan emosi keagamaan sehingga dapat menggunakan produk-produk bank syariah, khususnya *Qardhul hasan* untuk pengembangan usaha.

B. Bank Syariah, Pembiayaan, *Qardul Hasan* dan Usaha Kecil Menengah

1. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah)

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara yang berkelebihan dana dan yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut dalam bentuk pembiayaan⁶. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 4 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Bank syariah mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.⁷ Fungsi bank syariah secara umum terbagi menjadi dua yaitu fungsi sebagai lembaga bisnis (*Tijarah*) dan fungsi social (*Tabarru'*).⁸ Fungsi bisnis bank syariah terwujud melalui fungsi sebagai manajer investasi, fungsi sebagai investor, dan fungsi sebagai penyedia jasa keuangan, sedangkan fungsi social (*Tabarru'*) diwujudkan melalui Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF).⁹

Fungsi-fungsi lembaga keuangan syariah (Bank Syariah) dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁰

a. Bank Syariah sebagai Lembaga Bisnis

⁶Dawam M. Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, (LSAF), Jakarta, 1999, h. 410.

⁷Undang-undang No.21 Pasal 4 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, h. 68.

⁹Rizal Yahya, Aji Erlangga, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Salemba Empat, Jakarta 2009. h. 54

¹⁰*Ibid.*, h. 55-56

1) Bank Syariah sebagai manajer investasi

Sebagai manajer investasi, bank syariah berperan dalam pengelolaan dana yang dihimpun dari nasabah. Bank syariah berkewajiban mengelola dana yang terhimpun dengan hati-hati, profesional, serta transparan. Besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana (nasabah/ deposan) sangat bergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.

Setiap dana yang terhimpun dari nasabah harus dialokasikan kepada sektor-sektor yang akan memberikan hasil optimal karena hasil ini akan memberikan implikasi langsung kepada pemilik dana.

Fungsi manajer investasi ini dilakukan dengan cara menghimpun dana melalui prinsip *wadiah yad dhamanah* dan atau prinsip *mudharabah mutlaqah*. Prinsip *wadiah yad dhamanah* bisa dalam bentuk simpanan *giro wadiah* atau tabungan *mudharabah*, sedangkan prinsip *mudharabah mutlaqah* bisa dalam bentuk tabungan *mudharabah* atau *depositomudharabah*. Setiap dana yang terhimpun dari nasabah, khususnya dalam bentuk dana *mudharabah*, harus kembali disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada sektor-sektor yang produktif agar dana yang dihimpun tersebut dapat menghasilkan bagi pemilik dana/nasabah. Bank syariah tidak sepatutnya menghimpun dana *mudharabah* apabila tidak mampu menyalurkan dana tersebut pada sektor yang produktif karena bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana akan semakin mengecil.

2) Bank Syariah sebagai investor

Bank syariah yang berhasil menghimpun dana dalam bentuk *wadiah yad dhamanah*, *mudharabah mutlaqah*, atau dana lain (modal sendiri) kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk pooling dana.

Berbagai macam dana yang dihimpun dan dicampur dalam pooling dana inilah yang kemudian digunakan oleh bank syariah yang berfungsi sebagai investor untuk disalurkan kepada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah. Umumnya penyaluran dana (investasi) oleh bank syariah dilakukan melalui tiga jenis penyaluran:

- a) Prinsip Bagi Hasil, yaitu instrumen penyaluran dana kepada sektor-sektor produktif dengan menggunakan produk-produk pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
- b) Prinsip Ujroh, yaitu sarana penyaluran dana melalui produk-produk pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- c) Prinsip Jual-beli, yaitu penyaluran pendanaan melalui produk-produk pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *salam paralel*, *istishna* dan *istishna paralel*.

Selain itu investasi bisa juga disalurkan melalui pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Keuntungan dari setiap investasi yang dilakukan oleh bank syariah kemudian dibagikan kepada pemilik dana (nasabah/ deposan) berdasarkan akad yang telah disepakati antara bank syariah dengan pihak pemilik dana.

Penyaluran dana melalui beberapa instrumen dan mekanisme tersebut menegaskan fungsi bank syariah sebagai investor. Fungsi ini harus dijalankan dengan maksimal agar bank syariah mendapatkan keuntungan sehingga keuntungan yang didapat para pemilik dana menjadi maksimal juga.

3) Bank Syariah sebagai penyedia jasa Keuangan

Fungsi ini tidak jauh berbeda dengan fungsi yang telah dijalankan oleh bank konvensional (nonsyariah). Bank syariah juga bisa memberikan layanan transfer, RTGS (*Real Time Gross Settlement*), *kliring*, *inkaso*, *payroll* (pembayaran gaji), jasa pembayaran telpon, listrik, dan lain sebagainya, namun tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah yang telah ditetapkan. Hampir semua layanan jasa bank konvensional bisa juga diberikan oleh bank syariah, misalnya bank garansi, *letter of credit*, *mobile banking*, *net banking*, dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan karena secara sistem teknologi bank syariah juga telah mengadopsi teknologi-teknologi mutakhir dan maju sesuai dengan perkembangan jaman.

b. Bank Syariah sebagai Lembaga Sosial

Bank Syariah dan perbankan Islam umumnya diharuskan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, baik berupa penerimaan dana zakat, infak, sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) sekaligus penyaluran dana ZISWAF tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dengan cara yang transparan dan bertanggungjawab. Selain sebagai penerima dan penyalur dana ZISWAF, bank syariah juga memberikan pelayanan sosial melalui dana *Qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). Pinjaman kebajikan dana *Qardhul hasan* ini murni berdasarkan tujuan sosial atau tolong menolong, mekanismenya adalah bank syariah meminjamkan uang tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun. Selain transaksi *Qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) tersebut, bank syariah juga memiliki transaksi Salam yang digunakan untuk transaksi dengan mekanisme penyerahan barangnya dilakukan dikemudian hari tetapi pembayarannya dilakukan dimuka pada saat akad. Kedua transaksi tersebut (*Qardhul hasan* dan *Salam*) bagi bank konvensional tentulah sulit dilakukan, karena bagi bank konvensional yang menggunakan prinsip memperdagangkan uang, tentunya sangat rugi jika memberikan uang tanpa imbalan apapun atau memberikan uang yang belum ada barangnya.

2. Peran Bank Syariah dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin

Dalam Kehidupan di dunia tampaknya selalu ada permasalahan yang harus dipecahkan atau tantangan yang harus diselesaikan. Hal ini terjadi dari tingkat pribadi, keluarga, tetangga, sampai pada organisasi, umat beragama, bangsa atau negara. Jika kita berbicara masalah umat Islam, maka yang menjadi batasannya adalah agama Islam. Kita sadar bahwa mayoritas umat Islam adalah rendah dalam pendidikan dan ekonomi. Padahal, tidak ada satu pun ajaran Islam yang mengajurkan umat untuk menjadi pengemis, pemalas, dan miskin. Ajarannya selalu menekankan kepada umatnya agar menjadi orang yang memberi, bukan yang meminta.¹¹

Untuk itu, dalam penyelesaian masalah ini perlu adanya sikap saling tolong menolong diantara sesama umat Islam dengan membagikan sebagian hartanya kepada saudaranya yang lain dalam bentuk zakat, shadaqah, wakaf, dan infaq yang pendistribusiannya melalui lembaga-lembaga zakat dan lembaga keuangan mikro syariah. Dengan adanya dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dalam rangka menciptakan kemaslahatan umat. Pada saat

¹¹A. Qodry Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 7-150.

ini, dana zakat, shadaqah, wakaf, dan infaq perlu dikelola dengan manajemen yang tepat dan diposisikan sebagai dana umat. Sehingga penyaluran dana dari sumber beberapa jenis ini sudah tidak lagi sekedar konsumtif untuk segera habis, namun untuk dikelola yang dapat berkembang dan dananya itu menjadi modal bagi mereka yang masuk dalam kategori miskin dan kekurangan.¹²

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menyalurkan dana kepada masyarakat adalah perbankan syariah. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak saja berperan menyalurkan dana kepada para masyarakat mampu dan kalangan menengah yang mempunyai jaminan saja, akan tetapi juga menyalurkan dana kepada pengusaha kecil atau masyarakat kurang mampu yang mempunyai potensi keterampilan usaha. Yang menjadi keunggulan bank syariah dari aktivitas sosialnya adalah adanya skim pembiayaan *Qardhul hasan*. Produk ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Sesuai dengan prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah:¹³

- a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi,
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah,
- c. Memberikan zakat.

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada bank syariah atau istilah teknisnya disebut dengan aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening

¹²*Ibid.*, h. 7-150.

¹³Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2000), h. 126-130.

adnistratif serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).¹⁴

b. Falsafah Pembiayaan

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu:¹⁵

- 1) Aspek syariah, yang berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam yang antara lain tidak mengandung unsur maysir, gharar dan riba.
- 2) Aspek ekonomi yang berarti mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi bank syariah maupun nasabah itu sendiri.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:¹⁶

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam artian luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

3. Konsep Dana *Al-Qard* dan *Qardhul hasan*

a. Pengertian

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pemberian dana *al-Qard* kepada nasabah ini berdasarkan pada kebutuhan dana yang sifatnya mendesak. Sedangkan *Qardhul hasan* adalah Pinjaman lunak ini diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana nasabah tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal. Pemberian dana

¹⁴Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP YKPN, 2005), h. 16.

¹⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 203.

¹⁶Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah.*, h. 160.

Qardhul hasan ini didasarkan pada kewajiban untuk membantu masyarakat lemah berupa modal untuk membangun atau mengembangkan usaha.¹⁷

b. Perbedaan *Al-Qard* dan *Qardhul hasan*

Perbedaan antara *Al-qard* dan *Qardhul hasan* adalah pada sumber dana dan penggunaan dananya. Dalam aplikasi perbankan, dana *Qardhul hasan* diberikan kepada masyarakat lemah berupa modal untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Sedangkan dana *Al-Qard* diberikan kepada nasabah sebagai produk pelengkap atas terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, kemudian nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan. Dalam perbankan, pinjaman dana *Al-Qard* ini dapat berupa pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberikan keluasaan kepada nasabah untuk menarik uang tunai milik bank di ATM, kemudian nasabah tersebut mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.¹⁸

c. Sumber Dana *Al-Qard* dan *Qardhul hasan*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa dana *Al-Qard* dan *Qardhul hasan* dapat dari beberapa sumber yaitu:¹⁹

- 1) *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, maka sumber dana dapat diambil dari modal bank.
- 2) *Qardhul hasan* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, maka sumber dana dapat berasal dari zakat, *infaq*, dan *shadaqah*. Selain itu, ulama dan praktisi perbankan melihat adanya sumber lain untuk *Qardhul Hasan* yaitu dari pendapatan-pendapatan yang diragukan seperti bunga atas jaminan L/C di bank asing dan sebagainya.

d. Penggunaan Dana *Qardhul hasan*

¹⁷Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah.*, hal. 131. Serta lihat juga Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), h. 33.

¹⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, h. 131.

¹⁹*Ibid...*,h. 133.

Berdasarkan dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, bahwa komponen laporan penggunaan dana kebajikan meliputi:²⁰

1. Dana kebajikan produktif
2. Sumbangan
3. Penggunaan lain untuk kepentingan umum

Adapun penggunaan dana *Qardhul hasan* yang bersumber dari zakat, maka yang menjadi sasaran penyaluran dana tersebut adalah para *asnaf* yang didasarkan pada Firman Allah dalam Surah at-Taubah ayat 60:²¹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sebagaimana dengan penggunaannya, menurut Yusuf Qardhawi seperti yang dikutip oleh Didin Hafiduddin mengemukakan bahwa pemerintah Islam boleh membangun pabrik-pabrik atau perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka.²² Sehingga dana zakat tersebut menjadi dana yang produktif.

Penyaluran dana zakat produktif dapat dilakukan melalui:²³

1. Pemberian modal kerja dan pendampingan

²⁰Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h. 129-155.

²¹*Al-Quran dan Terjemahnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992

²²Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 134.

²³Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), h. 87.

2. Penjaminan bagi usaha kecil yang bermasalah
3. Pendirian sektor produksi yang dikerjakan oleh masyarakat lemah
4. Dan usaha-usaha produktif lainnya.

Sedangkan dana *Qardhul hasan* yang bersumber dari infaq dan shadaqah, maka dalam penyalurannya tidak ditentukan penerimanya.²⁴ Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambli bahwa infak hanya diberikan kepada orang-orang yang hidupnya susah baik muslim maupun non muslim. Dan menurut Mazhab Hanafi, infak itu hanya diberikan kepada kerabat dekat, anak yatim, dan orang miskin, atau orang yang pada umumnya mengalami kesulitan ekonomi.²⁵

Begitu juga dengan orang-orang yang berhak menerima dana yang berasal dari *shadaqah*, maka penyalurannya tidak terbatas pada penerima yang masuk dalam kelompok delapan *asnaf*. Sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim²⁶ bahwa sedekah sunah itu boleh diberikan kepada orang selain delapan *asnaf* yaitu istri, anak, pelayan dan orang lain yang dianggap lebih baik untuk menerimanya.²⁷

4. Konsep Usaha Kecil Menengah

Dalam kategori kelompok usaha dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok usaha kecil, menengah, dan usaha besar. Yang dimaksud kelompok usaha kecil, yaitu suatu usaha yang dikelola oleh pengusaha miskin, dan usaha homogen. Mereka pada umumnya bergerak dalam bidang usaha yang bersifat tradisional dan usaha kecil informal. Yang dimaksud dengan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana dan telah

²⁴Rifki Muhammad, *Akuntansi*, h. 434.

²⁵Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), h. 718.

²⁶Rasulullah SAW bersabda: "Bersedekahlah kamu,." Lalu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, saya mempunyai satu dinar uang." Rasulullah SAW bersabda: "Sedekahkanlah untuk dirimu sendiri." Laki-laki itu berkata lagi: "Ada satu dinar yang lain ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda: "Sedekahkanlah untuk istrimu". Kemudian dia berkata lagi: "Masih ada satu dinar lagi ya Rasulullah", maka Rasulullah SAW Bersabda: "Sedekahkanlah untuk anakmu." Kata laki-laki itu: "Masih ada satu dinar lagi". Rasulullah SAW bersabda: "Sedekahkanlah untuk pelayanmu." Ia berkata lagi: "Ada satu dinar lagi." Rasulullah SAW bersabda: "Terserah padamu, engkau lebih mengetahui ke mana yang lebih baik."

²⁷Ensiklopedi Hukum Islam..., h. 1618.

digunakan secara turun menurun dan banyak ditentukan oleh faktor alam.²⁸ Sedangkan untuk usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain, petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung.²⁹

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.³⁰

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah

²⁸Kwik Kian Gie, *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama & Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBIL, 1998), h. 218.

²⁹B.N Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil*, (Jakarta: PustakaBinaman Pressindo, 1996), h. 128.

³⁰“Regulasi Dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah DI Indonesia” <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Regulasi%20dalam%20revitalisasi%20-%20sri%20adiningasih.pdf>, diakses tanggal 8 Maret 2014. Lihat UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG KRITERIA USAHA KECIL

tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut³¹ :

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- d. Kriteria sebagaimana dimaksud pada point (a) 1, dan 2, point (b) 1 dan 2, serta point (c) 1 dan 2, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

³¹*Ibid*

C. Peningkatan Usaha Nasabah BSM Mataram

1. Deskripsi Modal Awal Usaha Nasabah

Sebelum mendapatkan pinjaman, rata-rata dari nasabah responden sudah memiliki modal usaha sendiri. Tabel berikut ini adalah gambaran kepemilikan modal usaha sendiri:

Tabel 1: Jumlah Modal Usaha Nasabah Sebelum Mendapat Pembiayaan

No	Jenis Usaha	Jumlah Modal Sendiri
1	Usaha Dagang	Rp 700.000
2	Usaha Dagang	Rp 2.000.000
3	Usaha Dagang	Rp 2.000.000
4	Usaha Dagang	Rp 2.000.000
5	Usaha Dagang	Rp 2.000.000
6	Usaha Dagang	Rp 2.000.000
7	Usaha Dagang	Rp 5.000.000
8	Usaha Dagang	Rp 10.000.000
9	Usaha Dagang	Rp 500.000
10	Usaha Dagang	Rp 500.000
11	Usaha Kue	Rp 4.000.000
12	Usaha Kue	Rp 2.000.000
13	Usaha Kue	Rp 2.000.000
14	Usaha Kue	Rp 2.000.000
15	Usaha Kue	Rp 2.000.000
16	Usaha Sayuran	Rp 500.000
17	Usaha Sayuran	Rp 500.000
18	Usaha Sayuran	Rp 300.000
19	Usaha Sayuran	Rp 300.000
20	Usaha Sayuran	Rp 500.000
	Rata-rata	Rp 2.040.000

Sumber : diolah dari angket

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nasabah usaha dagang, usaha kue dan usaha sayuran, rata-rata sudah mempunyai modal sendiri yang umumnya bervariasi. Untuk modal awal tertinggi adalah sebesar Rp. 10.000.000,-. Sedangkan modal awal terendah adalah sebesar Rp. 300.000,-. Dengan kata lain bahwa rata-rata kepemilikan modal sendiri untuk usaha dagang, usaha kue dan usaha sayuran adalah sebesar Rp. 2.040.000,-.

2. Deskripsi Jenis Usaha dan Jumlah Pinjaman

Untuk penyaluran dana *Qardhul hasan*, Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram telah mendistribusikan bantuan dalam berbagai macam jenis usaha.

Jenis usaha tersebut diantaranya adalah : Usaha Dagang, Usaha Kue dan Usaha Sayuran. Dalam penelitian ini, data responden yang diambil sebanyak 20 nasabah responden yang tersebar di sekitar wilayah Kota Mataram sesuai dengan kebijakan BSM yang membatasi nasabah untuk pembiayaan *Qardhul hasan* tidak lebih dari 20 nasabah. Diketahui bahwa semua jenis usaha responden mendapatkan bantuan berupa dana tambahan modal untuk usaha. Usaha responden di antaranya adalah usaha dagang sebanyak 10 orang, usaha kue sebanyak 5 orang dan usaha sayuran sebanyak 5 orang.

Tabel 2: Jenis Usaha Nasabah

Jenis Usaha	Jumlah Nasabah
Usaha Dagang	10
Usaha Kue	5
Usaha Sayuran	5

Sumber: diolah dari angket

Adapun besaran pemberian pinjaman Dana *Qardhul hasan*, Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram memberikan dana kepada nasabah berdasarkan pada tingkat kebutuhan mereka serta berdasarkan jenis usaha yang dijalani. Pada tabel di bawah ini, kita melihat bahwa semua nasabah membutuhkan tambahan modal, Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram memberikan rata-rata sebesar Rp. 1.300.000,- tambahan modal untuk semua jenis usaha. Pinjaman tertinggi adalah sebesar Rp. 2.000.000,- dan pinjaman terendah adalah sebesar Rp. 500.000,-.

Tabel 3: Jumlah Pinjaman Dana *Qardhul hasan*

No	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman
1	Usaha Dagang	Rp 2.000.000
2	Usaha Dagang	Rp 2.000.000
3	Usaha Dagang	Rp 2.000.000
4	Usaha Dagang	Rp 2.000.000
5	Usaha Dagang	Rp 500.000
6	Usaha Dagang	Rp 1.500.000
7	Usaha Dagang	Rp 2.000.000
8	Usaha Dagang	Rp 1.500.000
9	Usaha Dagang	Rp 2.000.000
10	Usaha Dagang	Rp 1.000.000
11	Usaha Kue	Rp 2.000.000
12	Usaha Kue	Rp 2.000.000
13	Usaha Kue	Rp 1.000.000

14	Usaha Kue	Rp 1.000.000
15	Usaha Kue	Rp 1.000.000
16	Usaha Sayuran	Rp 500.000
17	Usaha Sayuran	Rp 500.000
18	Usaha Sayuran	Rp 500.000
19	Usaha Sayuran	Rp 500.000
20	Usaha Sayuran	Rp 500.000
	Rata-rata	Rp 1.300.000

Sumber: diolah dari angket

3. Deskripsi Perubahan Modal Usaha Nasabah

Perubahan modal usaha adalah gambaran tentang total modal usaha yang dimiliki oleh nasabah responden setelah mendapatkan pinjaman dari Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram. Berikut ini adalah tabel tentang perubahan modal usaha nasabah responden:

Tabel 4: Total Modal Usaha Nasabah

No	Jenis Usaha	Modal Awal Usaha	Jumlah Pinjaman	Total Modal Usaha	Peningkatan Jumlah Modal (%)
1	Usaha Dagang	Rp 700.000	Rp 2.000.000	Rp 2.700.000	74%
2	Usaha Dagang	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	50%
3	Usaha Dagang	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	50%
4	Usaha Dagang	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	50%
5	Usaha Dagang	Rp 2.000.000	Rp 500.000	Rp 2.500.000	20%
6	Usaha Dagang	Rp 2.000.000	Rp 1.500.000	Rp 3.500.000	43%
7	Usaha Dagang	Rp 5.000.000	Rp 2.000.000	Rp 7.000.000	28%
8	Usaha Dagang	Rp 10.000.000	Rp 1.500.000	Rp 11.500.000	13%
9	Usaha Dagang	Rp 500.000	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000	80%
10	Usaha Dagang	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	66%
11	Usaha Kue	Rp 4.000.000	Rp 2.000.000	Rp 6.000.000	33%
12	Usaha Kue	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	50%
13	Usaha Kue	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	33%
14	Usaha Kue	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	33%
15	Usaha Kue	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	33%
16	Usaha Sayuran	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	50%
17	Usaha Sayuran	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	50%
18	Usaha Sayuran	Rp 300.000	Rp 500.000	Rp 800.000	62%
19	Usaha Sayuran	Rp 300.000	Rp 500.000	Rp 800.000	62%
20	Usaha Sayuran	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	50%
	Rata-rata	Rp 2.040.000	Rp 1.300.000	Rp 3.340.000	46%

Sumber: diolah dari angket

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk usaha dagang, usaha kue dan usaha sayuran terjadi perubahan modal usaha nasabah responden yaitu adanya peningkatan jumlah modal usaha dengan rata-rata sebesar Rp. 3.340.000,- atau sebesar rata-rata 46%. Adapun total modal usaha tertinggi adalah sebesar Rp. 11.500.000,- atau terjadi peningkatan sebesar 13% dari total modal. Untuk total modal terendah adalah sebesar Rp. 800.000,- atau terjadi peningkatan modal usaha sebesar 62% dari total modal.

4. Deskripsi Periode Usaha Berjalan Setelah Pembiayaan

Periode usaha berjalan ini menggambarkan aktivitas suatu usaha yang dilakukan setelah mendapatkan pinjaman. Pengukuran rentan waktu berjalannya usaha dilakukan berdasarkan waktu sejak menerima pinjaman sampai dengan dilakukan penelitian yaitu per 10 Maret 2011. Berikut ini tabel periode berjalan usaha nasabah responden:

Tabel 5: Periode Berjalan Usaha Nasabah

Jenis Usaha	Periode Berjalan Usaha (Bulan)
Usaha Dagang	34
Usaha Dagang	34
Usaha Dagang	34
Usaha Dagang	34
Usaha Dagang	34
Usaha Dagang	34
Usaha Dagang	22
Usaha Dagang	22
Usaha Dagang	22
Usaha Dagang	19
Usaha Kue	24
Usaha Kue	24
Usaha Kue	22
Usaha Kue	16
Usaha Kue	16
Usaha Sayuran	16
Usaha Sayuran	16
Usaha Sayuran	16
Usaha Sayuran	11
Usaha Sayuran	11
Rata-rata	23

Sumber: hasil olahan angket

Pada tabel di atas diketahui bahwa rata-rata usaha nasabah responden telah berjalan selama 23 bulan sejak mereka mendapatkan pinjaman dana *Qardhul hasan* sampai dengan dilakukan penelitian ini. Selanjutnya usaha nasabah responden yang paling lama adalah usaha yang telah berjalan selama 34 bulan. Sedangkan tersingkat adalah baru berjalan selama 11 bulan.

5. Deskripsi Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah

Peningkatan usaha merupakan gambaran tentang kemajuan usaha yang dicapai setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram. Adanya kenaikan atau penurunan pendapatan usaha setelah mendapatkan pinjaman dana *Qardhul hasan*, maka perlu adanya perbandingan antara pendapatan sebelum dan sesudah pembiayaan.

Pendapatan bersih sebelum mendapatkan pinjaman dan pendapatan bersih setelah mendapatkan pinjaman akan menjadi acuan seberapa besar peningkatan pendapatan yang terjadi. Adapun pendapatan bersih setelah mendapatkan pinjaman ini setelah dipotong angsuran kepada pihak Bank Syariah Mandiri. Peningkatan atau penurunan akan terlihat setelah dilakukannya perbandingan.

Berikut ini adalah tabel hasil survai terhadap nasabah responden sebanyak 20 responden, yaitu

Tabel 6: Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah

Jenis Usaha	Pendapatan bersih sebelum pembiayaan (Rp)	Pendapatan Kotor setelah pembiayaan (Rp)	Kewajiban Kepada Bank (Angsuran) (Rp)	Pendapatan Bersih setelah pembiayaan (Rp)	Kenaikan Pendapatan (Rp)	Kenaikan Pendapatan Bersih (%)
UD	550.000	950.000	100.000	850.000	400.000	88%
UD	600.000	1.000.000	100.000	900.000	400.000	44%
UD	450.000	800.000	100.000	700.000	350.000	50%
UD	500.000	900.000	100.000	800.000	400.000	50%
UD	400.000	850.000	50.000	800.000	450.000	58%
UD	650.000	1.000.000	100.000	900.000	350.000	38%
UD	750.000	1.200.000	100.000	1.100.000	450.000	41%
UD	1.500.000	2.500.000	200.000	2.300.000	1.000.000	43%
UD	400.000	800.000	50.000	750.000	400.000	53%
UD	350.000	700.000	50.000	650.000	350.000	54%
UK	550.000	900.000	100.000	800.000	350.000	43%
UK	500.000	800.000	100.000	700.000	300.000	43%

UK	400.000	650.000	50.000	600.000	250.000	41%
UK	450.000	750.000	50.000	700.000	300.000	43%
UK	550.000	850.000	50.000	800.000	300.000	38%
US	350.000	550.000	50.000	500.000	200.000	40%
US	300.000	500.000	50.000	450.000	200.000	44%
US	250.000	400.000	50.000	350.000	150.000	43%
US	250.000	450.000	50.000	400.000	200.000	50%
US	350.000	500.000	50.000	450.000	150.000	33%
Rata-Rata	505.000	852.500	77.500	775.000	400.000	66%
Max	1.500.000	2.500.000	200.000	2.300.000	1.000.000	88%
Min	250.000	400.000	50.000	350.000	150.000	33%

Sumber: Data diolah dari angket

Keterangan:

UD : Usaha Dagang

UK : Usaha Kue

US : Usaha Sayuran

Berdasarkan pada tabel diatas, untuk pendapatan sebelum mendapatkan dana pembiayaan, secara keseluruhan rata-rata nasabah memperoleh pendapatan sebesar Rp. 505.000,- perbulan. Sedangkan untuk nasabah yang memperoleh pendapatan tertinggi adalah sebesar Rp. 1.500.000,-, dan terendah adalah sebesar Rp. 250.000,- perbulan. Selanjutnya, setelah mendapatkan pembiayaan, maka pendapatan kotor rata-rata nasabah responden adalah sebesar Rp. 852.500,-. Sedangkan untuk pendapatan tertinggi adalah sebesar Rp. 2.500.000,- dan terendah adalah sebesar Rp. 400.000,-.

Dari pendapatan kotor rata-rata tersebut, nasabah masih mempunyai kewajiban untuk mengangsur hutang pinjaman dana *Qardhul hasan* yang rata-rata adalah sebesar Rp. 77.500,- per bulan. Angsuran tertinggi adalah sebesar Rp. 200.000,- dan terendah adalah Rp. 50.000,-. Dengan adanya pembayaran angsuran pengembalian pinjaman tersebut, maka pendapatan bersih rata-rata nasabah responden adalah sebesar Rp. 775.500,-. Pendapatan bersih tertinggi adalah sebesar Rp. 2.300.000,- dan terendah adalah sebesar Rp. 350.000,-.

Dengan melihat adanya perbedaan antara pendapatan bersih sebelum pembiayaan dan sesudah pembiayaan, maka diketahui bahwa ada kenaikan pendapatan dengan rata-rata sebesar Rp. 400.000,- per bulan dengan kenaikan pendapatan tertinggi sebesar Rp. 1.000.000,- dan terendah sebesar Rp. 150.000,-. Dengan demikian bahwa terjadi kenaikan rata-rata sebesar Rp. 66% per bulannya.

Kontribusi dari pembiayaan *Qardhul hasan* terhadap usaha nasabah adalah adanya kenaikan pendapatan yang rata-ratanya adalah sebesar Rp. 400.000,- atau sekitar 66%. Dengan adanya kenaikan pendapatan ini berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan bersih para nasabah yang sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp. 505.000,- menjadi rata-rata sebesar Rp. 775.000,- perbulan setelah menyelesaikan pembayaran angsuran rata-rata nasabah responden sebesar Rp. 77.500,-.

Selain itu, kontribusi dari pembiayaan ini bagi masyarakat miskin yang menjadi nasabah adalah membantu masyarakat miskin (nasabah) untuk melepaskan diri dari garis kemiskinan. Menurut Bank Dunia bahwa masyarakat yang masuk dalam garis kemiskinan adalah masyarakat yang berpenghasilan sebesar Rp. 540.000,- per orang perbulan.³² Dengan adanya pendapatan bersih (setelah angsuran) nasabah *Qardhul hasan* dengan rata-rata sebesar Rp. 775.000,-, maka kondisi tersebut menandakan bahwa pendapatan nasabah *Qardhul hasan* telah meningkat sebesar Rp. 235.000 atau 18% diatas batas garis kemiskinan sebesar Rp. 540.000,-.

Untuk para nasabah usaha dagang, rata-rata pendapatan bersih mereka setelah mendapatkan pinjaman adalah sebesar Rp. 975.000,- yang sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp. 615.000,. Sehingga dengan adanya pembiayaan ini pendapatan mereka mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp. 455.000,- perbulan atau rata-rata 51%. Pendapatan bersih ini dihitung berdasarkan pengurangan oleh kewajiban angsuran mereka yang rata-rata angsuran sebesar Rp. 86.000,- per bulannya.

Sedangkan untuk usaha kue, sebelum mendapatkan pinjaman *Qardhul hasan* rata-rata perbulannya mereka hanya memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp. 490.000,-. Dengan adanya pembiayaan ini, pendapatan mereka mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp. 720.000,- perbulan atau terjadi kenaikan rata-rata 41% yaitu Rp. 300.000,-. Pendapatan bersih ini dihitung berdasarkan pengurangan oleh kewajiban angsuran mereka yang rata-rata angsuran sebesar Rp. 70.000,- per bulannya.

Adapun untuk usaha sayuran, rata-rata pendapatan bersih mereka setelah mendapatkan pinjaman adalah sebesar Rp. 430.000,- yang sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp. 300.000,. Sehingga

³²“Menggugat Ukuran Kemiskinan” oleh Ali Khomsan, *perpustakaan mashudi.wordpress.com/2008/03/28/menggugat-ukuran- kemiskinan/* - 34k, diakses tanggal 10 Januari 2011.

dengan adanya pembiayaan ini pendapatan mereka mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp. 180.000,- perbulan atau rata-rata 42%. Pendapatan bersih ini dihitung berdasarkan pengurangan oleh kewajiban angsuran mereka yang rata-rata angsuran sebesar Rp. 50.000,- per bulannya.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan pembiayaan *qarḍ al-hasan* di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram diaplikasikan dalam program yang disebut dengan Program Mitra Umat yaitu : Program Didik Umat (Pemberdayaan Ekonomi) dan Simpati Umat (Kepedulian Sosial), dalam pengembangannya mencakup kegiatan ekonomi produktif maupun konsumtif, sosial kemasyarakatan meliputi pendidikan, kesehatan. Secara garis besar program ini terbagi dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi (diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman *qarḍ al-hasan* berupa modal usaha atau investasi dan konsumtif) dan kegiatan sosial (sumbangan). Dalam proses pelaksanaan pemberian pembiayaan ini Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram banyak memberikan kemudahan-kemudahan terutama dalam proses pengajuan dan pembayaran angsuran, sehingga nasabah merasa nyaman dengan pelayanan pembiayaan ini. Akan tetapi, pembiayaan ini hanya diberikan kepada calon nasabah yang mempunyai kepercayaan yang tinggi serta kemauan dan kemampuan. Sedangkan untuk pengawasan, Bank Syariah Cabang Mataram lebih mengutamakan pada jalinan komunikasi intensif. Prinsip dasar pembiayaan *qarḍ al-hasan* Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Mataram adalah rasa kepedulian, tanggung jawab serta kewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sejak awal tahun 2008, Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram telah menyalurkan dana *qarḍ al-hasan* senilai Rp. 55.500.000,- kepada 50 nasabah sampai dengan 10 Maret 2011. Untuk sumber dana, Bank Syariah Mandiri Cabang hanya mendapatkan dana dari Lembaga Amil Zakat BSM Umat Kantor Pusat. Sedangkan untuk alokasi penyaluran pembiayaan, Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram menetapkan sebesar 70% untuk usaha produktif dan 30% untuk sumbangan sosial. Penyaluran dana *qarḍ al-hasan* untuk usaha produktif, Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram menetapkan pembagiannya kepada empat dari delapan asnaf yaitu fakir, miskin, *gārimīn*, dan *riqāb*. Sedangkan penyaluran dana *qarḍ al-hasan* untuk sumbangan sosial bank menetapkan pembagiannya hanya kepada *fi sabilillāh*, *ibnu sabīl* dan

muallaf. Pelaksanaan pembiayaan *qarḍ al-hasan* di BSM kota Mataram sudah sesuai dengan syariah dan ketentuan dan persyaratan DSN.

Kontribusi dana *qarḍ al-hasan* bagi Usaha Mikro nasabah adalah adanya peningkatan pendapatan yang rata-ratanya adalah sebesar Rp. 400.000,- atau sekitar 66%. Dengan adanya kenaikan pendapatan ini berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan bersih (setelah dipotong angsuran) para nasabah yang sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp. 505.000,- menjadi rata-rata sebesar Rp. 775.000,- perbulan. Dengan adanya peningkatan pendapatan usaha sebesar 66% berarti pembiayaan *qarḍ al-hasan* telah memberikan kontribusi sebesar Rp. 235.000,- atau 18% kepada masyarakat miskin untuk berada di atas batas garis kemiskinan yang menurut Bank Dunia yaitu penghasilan sebesar Rp. 540.000,- per orang per bulan. Selain pendapatan nasabah responden mengalami peningkatan, modal usaha juga mengalami peningkatan. Bagi usaha Dagang, Kue dan Sayuran, modal usaha secara keseluruhan rata-rata meningkat menjadi Rp. 3.340.000, atau mengalami peningkatan sebesar 46%. Terjadinya peningkatan modal usaha ini tentu juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah aset usaha yang sebelumnya hanya rata-rata Rp. 2.040.000,-.

Daftar Pustaka

- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Cetakan 1, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003).
- Akhmad Mujahidin, *Penguatan Usaha Ekonomi Umat Melalui Perbankan Syariah*, (Annual Conference On Islamic Studies (ACIS) ke-10, Banjarmasin 1-4 November 2010).
- Al-Quran dan Terjemahnya, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992
- A. Qodry Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- B.N Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996).
- Dawam M. Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Lembaga Studi Agama dan Filsafat, (LSAF), Jakarta, 1999).

- , *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Dalam Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, (UII Press, Yogyakarta, 2005).
- Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve)
- Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Cet. I (Yogyakarta : LPPI, 2001).
- Kwik Kian Gie, *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama & Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII, 1998).
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP YKPN, 2005).
- , *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
- , *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, (Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, Yogyakarta, 2005).
- , *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (UII Press, Yogyakarta, 2000).
- , *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002).
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006).
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003)
- M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan Pertama. (Jakarta : Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendikia : 2001).
- Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004, tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008).
- Rizal Yahya, Aji Erlangga, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Salemba Empat, Jakarta 2009).
- Undang-undang No.21 Pasal 4 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2000).

-----, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Cetakan 3, (Jakarta: Pustaka Azkia Publisher, 2009).

Lain-Lain

www. *Seputar –indonesia.com* : *Raih Dukungan Bank Syariah*,

<http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2009/08/13/memahami.bank-syariah-melalui-fungsinya/> ,

<http://www.syariahmandiri.co.id/en/2010/05/bsm-relokasi-cabang-mataram/>